

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT PADA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL**



Oleh :

ASLAM
NIM. 2220215310075

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT PADA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**ASLAM
NIM. 2220215310075**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

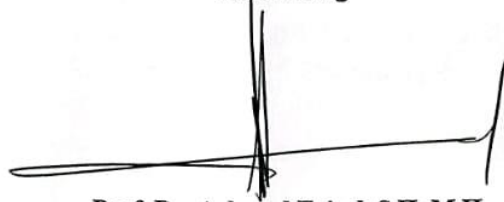
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Aslam**

Nama : **Aslam**

NIM : **2220215310075**

Disetujui,

Pembimbing



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

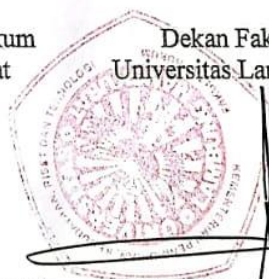
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH.,M.H

NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H

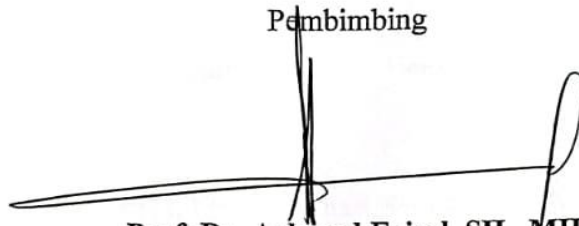
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Achmad Faisal, SH., MH.
NIP. 19750615 200312 1 001

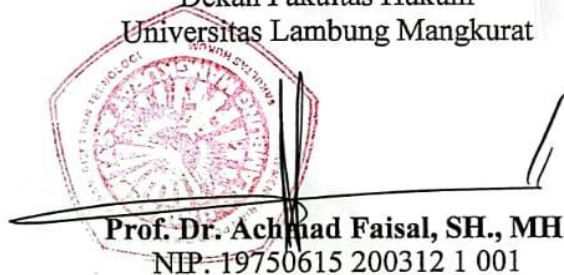
Disahkan Oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, SH., MH.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini Telah dinilai dan Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : **Prof, Dr, H.Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

Sekretrais : **Prof. Dr. Suprpto, SH., MH**

Anggota : **Prof. Dr. Achmad Faisal, SH., MH**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aslam**
NIM : 2220215310075
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Aslam
NIM. 2220215310075

ASLAM. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr.Achmad Faisal, S.H.,M.H. 100 halaman**

RINGKASAN

Dasar hukum Jaminan Kesehatan, telah dimandatkan dalam UUD-RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” Selanjutnya, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam UUD-RI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam perlindungan hukum sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung dirugikan.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan JKN membutuhkan perbaikan dengan cara memperkuat fungsi kontrol Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai pengawas BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Hal ini dalam operasionalisasinya melemahkan posisi DJSN yang seharusnya menjadi lembaga yang berwenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan secara langsung.

Mencermati kondisi yang ada dalam penerapan Program jaminan kesehatan di Indonesia dalam hal ini program BPJS, maka peran pemerintah menjadi sentral untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam kaitan ini, masyarakat sebagai subyek pelayanan kesehatan adalah salah satu kelompok yang terkena langsung dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan kesehatan, namun

persoalan perlindungan hukum merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan alas hak yang proporsional bagi masyarakat sebagai subyek hukum, termasuk didalamnya adalah persoalan bentuk pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas jaminan kesehatan yang diberikan.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan dua Perlindungan hukum kepada pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan yaitu perlindungan hukum preventif dengan memberitahukan hak-hak yang didapatkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan perlindungan hukum represif yaitu peserta diberikan hak untuk melakukan pengaduan, menyampaikan keluhan, serta menuntut dan meminta ganti rugi kepada fasilitas kesehatan jika terdapat pelanggaran atau diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
2. Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan dari aspek kepesertaannya, akan tetapi dipandang sebagai pasien dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya. Seperti halnya dengan hak, pasien tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak yang telah diperolehnya.

ASLAM. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr.Achmad Faisal, S.H.,M.H.** 100 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat, JKN, BPJS

Perlindungan hukum dan hak-hak Masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi Badan Layanan Publik untuk melaksanakan lima program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan dan program lainnya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS terkendala pada belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku. Masih terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bagi para pihak yang merasa di rugikan dan pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit pengendalian mutu, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi yang dibuat secara tertulis, bersifat final dan mengikat. Pada pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan dari aspek kepesertaannya, akan tetapi dipandang sebagai pasien dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya. Seperti halnya dengan hak, pasien tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak yang telah diperolehnya.

ASLAM. 2024. LEGAL PROTECTION AND FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : **Prof. Dr.Achmad Faisal, S.H.,M.H.** 100 pages

ABSTRACT

Keywords: *Legal Protection, Community Rights, JKN, BPJS*

The legal protection of Public' rights participating in the Health Social Security Administering Board (BPJS), in obtaining government health services, issued Law Number 24 of 2011 stipulating two State-Owned Enterprises namely PT Askes (Persero) and PT Jamsostek (Persero) to be changed in form became a Public Service Agency to carry out five programs mandated by Law Number 40 of 2004, namely the Health Insurance program for Health BPJS and other programs submitted to BPJS Employment. Hospitals in providing health services to BPJS participants are constrained by the unmet fulfillment of facilities and infrastructure in accordance with applicable standards and the non-fulfillment / availability of consumable medicines and medical materials needed. The provision of Article 49 of Law Number 24 Year 2011 states that for those parties who feel disadvantaged and their complaints cannot be resolved by the quality control unit, dispute resolution can be done through a mediation mechanism. Settlement agreements through mediation must be in writing, final and binding. In the case of complaints that cannot be resolved by controlling the quality of services and handling complaints by participants through the unfinished mechanism of dispute resolution, it can be submitted to the District Court in the area where the applicant lives.

The rights and obligations of health insurance participants are not only considered from the aspect of their participation, but are seen as patients in utilizing health facilities which should be seen from a human rights perspective in fulfilling their rights. As with rights, patients certainly have obligations that must be fulfilled in order to achieve healing and as a balance of the rights they have obtained.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pendedaannya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya, maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.
- ❖ Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.
- ❖ Jika Kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. (Imam Syafi'i)

Persembahkan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- ✓ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku.
- ✓ Orang tua tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang selalu mendukung setiap langkah kebaikan untuk anaknya.
- ✓ Isteri tercinta, dan anak-anakku, yang telah memberikan support dan semoga menjadi motivasi bagi kalian untuk selalu menuntut ilmu.
- ✓ Kawan-kawan Almamater Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, SWT yang maha kuasa karena berkat rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**” yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S-2) pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Peminatan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat **Prof. Dr. Achmad Faisal, SH., MH.** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat **Prof, Dr, H.Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** yang telah memberikan izin dan sarana serta prasarana dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini.
4. Dosen pembimbing **Prof. Dr. Achmad Faisal, SH., MH.** yang berkenan menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi masukan, informasi dan arahan serta bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini sehingga menjadi lebih baik.

5. Kedua dosen penguji **Prof. Dr. Suprpto, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H.Ahmad Syaufi, SH., MH.** yang meluangkan waktu dan masukan yang berharga dan membangun penulis dalam penyusunan tesis ini agar menjadi semakin baik.
6. Seluruh dosen Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat atas segala ilmu yang telah dibekalkan sehingga penulisan tesis menjadi lebih baik.
7. Seluruh Staf akademik Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu keperluan administrasi akademik selama studi dan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang selalu mendukung setiap langkah kebaikan untuk anaknya.
9. Istri tercinta yang selalu meluangkan waktu dan memberikan dorongan, serta memberikan semangat pada saat proses penulisan tesis sedang berlangsung dan Anak-anakku tersayang yang selalu menghibur, menjadi penyejuk hati sehingga penulis selalu merasa bersemangat untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Saudara dan Saudari ku serta Keluarga yang telah memberikan semangat, do'a dan dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian studi ini.
11. Rekan seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum serta semua pihak yang membantu dan menjadi inspirasi penulisan tesis ini.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini, sehingga saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis

ASLAM

NIM. 2220215310075

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO / PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	45
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	50
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG DI SELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN	51
A. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Masyarakat Peserta Program jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan	51
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan	54
C. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terhadap Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan.....	69
BAB III PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN.....	77
A. Landasan Yuridis Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan	77

B. Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan	82
C. Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.....	92
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA